

## **NASKAH KEBIJAKAN**

# **AKSELERASI KEMANDIRIAN KPM PKH MELALUI PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI DALAM PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA**



# **NASKAH KEBIJAKAN**

## **AKSELERASI KEMANDIRIAN KPM PKH MELALUI PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI DALAM PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA**

Diterbitkan pertama pada 2024 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

**NASKAH KEBIJAKAN**

**AKSELERASI KEMANDIRIAN KPM PKH  
MELALUI PENGUATAN KAPASITAS  
EKONOMI DALAM PERTEMUAN  
PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA**

Penerbit BRIN

©2024 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Naskah Kebijakan Akselerasi Kemandirian KPM PKH melalui Penguatan Kapasitas Ekonomi dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga/Robben Rico, Faisal, Haruman Hendarsah, Diandini Rachmawati Irawan, Muhammad Imam Saputra, Badrun Susantyo, Hari Harjanto Setiawan, Habibullah, Nyi R Irmayani, Muhtar, Sugiyanto, Husmiati, Dian Purwasantana, Muslim Sabarisman, Rudy Gunawan Erwinsyah, Fatwa Nurul Hakim, Gustaf Wijaya, Johan Arifin, Bilal As'adhanayadi - Jakarta: Penerbit BRIN, 2024.

v+24 halaman, 21 x 29,7 cm

Copy editor : Martinus Helmiawan

Penata isi : Gustaf Wijaya & Dhevi E.I.R. Mahelingga

Desainer sampul : Gustaf Wijaya & Dhevi E.I.R. Mahelingga

Terbitan pertama : Oktober 2024

Diterbitkan oleh:



Penerbit BRIN, Anggota Ikapi  
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah  
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8,  
Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340  
Whatsapp: +62 811-1064-6770  
E-mail: [penerbit@brin.go.id](mailto:penerbit@brin.go.id)  
Website: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)

 PenerbitBRIN

 Penerbit\_BRIN

 Penerbit.brin



Program Keluarga Harapan (PKH), diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada 2007, adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun telah menunjukkan hasil positif, PKH menghadapi tantangan dalam proses graduasi penerima manfaat. Banyak keluarga kesulitan mencapai kemandirian ekonomi berkelanjutan tanpa dukungan lanjutan. Upaya seperti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) belum sepenuhnya efektif dalam mendorong graduasi mandiri. Diperlukan skema baru yang lebih komprehensif dan dapat diterima berbagai pihak untuk mendukung transisi keluarga penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi, sambil tetap mempertahankan perlindungan sosial yang diperlukan.



# **AKSELERASI KEMANDIRIAN KPM PKH MELALUI PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI DALAM PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA**

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 (Habibullah, 2008, 2011). Secara umum, PKH adalah program yang memberikan bantuan uang tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi KPM diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, di antaranya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (Habibullah & Noviana, 2013). PKH telah memberikan beberapa hasil positif, termasuk lebih banyak persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penurunan sebesar 50% pada anak-anak berusia 7–15 tahun yang tidak bersekolah, dan sepertiga pengurangan pekerja anak pada kelompok usia 13–15 tahun (Cahyadi et al., 2020).

Pelaksanaan PKH didasarkan pada Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Perpres No 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai, Perpres No 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024, dan Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin, dengan syarat bahwa mereka memenuhi kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan menerima perawatan kesehatan yang memadai. Bantuan sosial PKH diterima KPM secara periodik dengan jumlah bantuan sosial disesuaikan dengan beberapa komponen, yaitu ada tidaknya ibu hamil, anak usia dini (AUD), anak usia sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Bantuan sosial PKH dimanfaatkan untuk biaya pendidikan (38,64 persen), membeli beras (19,74 persen), pakaian, alas kaki dan tutup kepala (8,03 persen), biaya kesehatan (6,79 persen), ikan (4,85 persen), telur dan susu (4,67 persen) (Habibullah et al., 2017).

Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan baru muncul dalam implementasi PKH, terutama terkait dengan proses graduasi atau keluarnya penerima manfaat dari program setelah kondisi ekonomi mereka membaik. Graduasi mandiri adalah ciri khas dari PKH yang membedakannya dari program bantuan sosial lainnya. Meskipun demikian, banyak keluarga penerima manfaat yang merasa kesulitan untuk mencapai kemandirian ekonomi



yang berkelanjutan tanpa adanya dukungan lanjutan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk merancang skema baru yang lebih efektif dalam mendukung graduasi penerima manfaat PKH. Skema baru ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat sehingga mereka dapat mandiri secara berkelanjutan. Skema baru ini juga perlu mencakup mekanisme perlindungan sosial yang adaptif serta terintegrasi dengan program-program lain yang relevan, seperti Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi keluarga yang sedang dalam masa transisi.

Penguatan ekonomi keluarga melalui PENA perlu didukung dengan pendampingan dan penyadaran kepada KPM PKH. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang diharapkan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lewat pembelajaran dalam perubahan perilaku yang lebih baik, belum mampu menyadarkan KPM PKH untuk graduasi dari PKH. P2K2 merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku dalam bentuk pembelajaran yang terstruktur yang diberikan oleh pendamping sosial PKH terlatih kepada KPM PKH yang dilaksanakan sejak tahun 2015. P2K2 adalah kegiatan pertemuan bulanan yang rutin diselenggarakan oleh pendamping sosial PKH terhadap KPM PKH dengan muatan materi pengetahuan praktis mengenai pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan dan gizi, ekonomi, perlindungan anak, kesejahteraan sosial dan pencegahan dan penanganan *stunting* (Suradi et al., 2019). Meskipun sudah ada kegiatan P2K2, kesadaran masyarakat khususnya keluarga yang sudah meningkat kesejahteraannya untuk keluar secara sukarela dari PKH sangat rendah. Bahkan terjadi penolakan program pemberdayaan yang ditawarkan Kementerian Sosial yaitu Kewirausahaan Sosial dengan sebutan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) karena jika menerima program PENA tersebut maka KPM PKH akan digraduasi (Setiawan et al., 2023; Yuda et al., 2023).

Dengan adanya skema baru ini, diharapkan PKH dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Selain itu, berbagai upaya pernah dilakukan untuk mendorong graduasi sejahtera mandiri, antara lain pemasangan stiker pada rumah KPM PKH, berbagai program pemberdayaan baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial maupun pihak lain Pemerintah daerah, Perusahaan/CSR, maupun organisasi sosial lainnya. Namun, upaya tersebut belum maksimal sehingga P2K2, khususnya modul ekonomi, diharapkan menjadi instrumen utama dalam mendorong graduasi sejahtera mandiri KPM PKH. Oleh karena itu, diperlukan desain skema Baru Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang diharapkan bisa diterima oleh banyak pihak.



Ibu Fahriyah berhasil mendirikan Roti Najwa di Martapura Timur, dengan modal dari PENA, dan graduasi PKH. Modal PENA ia gunakan untuk membeli alat dan bahan roti.

## KERANGKA KONSEP

### A. Bantuan Tunai Bersyarat - Konsep Bantuan Tunai Bersyarat

Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau *Conditional Cash Transfer (CCT)* adalah program pemberian bantuan sosial berupa uang tunai kepada keluarga atau individu yang miskin dan rentan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat. Syarat ini biasanya berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah, mengikuti program kesehatan, atau meningkatkan keterampilan ekonomi. CCT bertujuan untuk:

- 1) Mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung untuk kebutuhan dasar.
- 2) Meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
- 3) Memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai.

CCT tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong penerima manfaat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Keberhasilan program 'Model Graduasi' generasi pertama di Bangladesh telah mendorong proyek percontohan di beberapa negara di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Karibia. Program kelulusan bertujuan untuk menyediakan paket dukungan yang berurutan dan intensif bagi orang-orang yang sangat miskin, dengan tujuan memfasilitasi pergerakan mereka keluar dari kemiskinan ekstrem menuju ketahanan dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Paket tersebut biasanya mencakup transfer tunai rutin, aset produktif, akses ke fasilitas tabungan, serta pelatihan dan pembinaan mata pencaharian. Graduasi merupakan kontribusi penting dan berharga bagi kebijakan pembangunan, tetapi mereka tidak boleh menggantikan fungsi perlindungan sosial inti dari bantuan sosial dan asuransi sosial.

## **B. Relevansi *Conditional Cash Transfer* dengan Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bentuk CCT yang diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. PKH memiliki tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin yang memiliki anak-anak usia sekolah atau anggota keluarga yang rentan, seperti ibu hamil, balita, dan penyandang disabilitas. PKH relevan dengan konsep CCT karena:

- 1) Syarat Kepatuhan: PKH menetapkan syarat kepatuhan bagi penerima manfaat, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin.
- 2) Investasi dalam Pendidikan dan Kesehatan: Dengan memastikan anak-anak penerima manfaat bersekolah dan mendapatkan layanan kesehatan, PKH berinvestasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
- 3) Mengurangi Beban Ekonomi: PKH membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial di masa mendatang.

Melalui pendekatan CCT, PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang positif di kalangan penerima manfaat, yang pada akhirnya bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

### C. Perlindungan Sosial Adaptif

Kriteria yang digunakan dalam graduasi menurut Brac (2018) adalah masyarakat miskin dapat melakukan transisi ke program lain yang berkelanjutan dan penghidupan yang berketahanan. Tingkat kemandirian ini diukur dengan ketahanan pangan, akses gizi yang cukup, akses terhadap modal sosial (*bonding, bridging, dan linking*), keragaman mata pencaharian, kepemilikan produktif dan akses terhadap sumber daya keuangan serta akses ke pasar, jasa, infrastruktur, sumber daya alam komunal dan informasi. Sementara itu, indikator yang sensitif terhadap anak di antaranya adalah anak bersekolah, asupan makanan bergizi, ketahanan psikososial, harga diri dan hak pilihan.

Model graduasi dengan integrasi berbagai program elemen kunci pemberdayaan menjadi dasar yang menentukan keluarga penerima manfaat menjadi mandiri serta dapat keluar dari kemiskinan dan dapat digraduasi. Terdapat empat pilar yang terintegrasi melalui (1) intervensi perlindungan sosial, (2) peningkatan mata pencaharian, (3) inklusi keuangan, dan (4) pemberdayaan sosial, serta menjamin terjadinya ketahanan pangan rumah tangga, keberagaman pendapatan, ketahanan ekonomi, dan inklusi sosial. Implementasi pilar tersebut dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat ultra miskin/miskin ekstrem.

Empat pilar yang terintegrasi tersebut dijalankan dengan pendampingan yang intensif, termasuk pada tahapan program di tiap pilarnya. Bentuk fasilitas yang diberikan dalam tiap pilar adalah sebagai berikut.

- 1) *social protection*: perlindungan sosial termasuk ketahanan pangan dan akses pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan akses air bersih dan kebersihan.
- 2) *livelihood*: pengalihan aset, pelatihan teknis dan *soft skill*, ketersediaan akses pasar, pengelolaan risiko bencana, pengurangan risiko bencana.
- 3) inklusi keuangan: *saving support*, literasi keuangan, dan akses ke lembaga keuangan.
- 4) *social empowerment* didukung dengan kegiatan *life skill training*, partisipasi komunitas, mencerminkan kesetaraan gender dan memperkuat mengurus anak-anak agar menjadi lebih baik dan lebih berpendidikan.

#### D. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah komponen penting dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mempercepat perubahan perilaku dan meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Secara teori, P2K2 dirancang sebagai proses pembelajaran terstruktur yang dilaksanakan melalui pertemuan bulanan yang dipandu oleh pendamping PKH. Materi dalam P2K2 mencakup lima modul utama, yaitu pendidikan dan pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, kesehatan dan gizi, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial.

Dalam praktiknya, P2K2 dilaksanakan secara rutin dan melibatkan KPM dalam diskusi interaktif serta kegiatan praktis untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Modul ekonomi dalam P2K2 khususnya memberikan fokus pada pengelolaan keuangan rumah tangga dan perencanaan usaha, dengan tujuan meningkatkan keterampilan ekonomi KPM sehingga mereka dapat mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan mempersiapkan diri untuk mencapai kemandirian ekonomi. Melalui kombinasi teori dan praktik dalam P2K2, diharapkan KPM dapat meningkatkan kapasitas diri dan keluarga, sehingga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.



## E. Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi

Pemberdayaan dan kemandirian ekonomi adalah dua konsep kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pemberdayaan mengacu pada proses memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara mandiri. Kemandirian ekonomi, di sisi lain, berarti bahwa KPM mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa bergantung pada bantuan sosial jangka panjang.

**Pemberdayaan:** Pemberdayaan dalam konteks PKH melibatkan berbagai intervensi, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses ke layanan keuangan. Misalnya, program Program Keluarga Usaha Sejahtera (ProKUS) bertujuan untuk memberdayakan KPM yang telah lulus dari PKH dan memiliki usaha kecil, melalui bantuan stimulan dan pendampingan usaha. Pemberdayaan juga mencakup penguatan modal sosial, di mana KPM didorong untuk membangun jaringan dan kolaborasi yang dapat mendukung upaya mereka menuju kemandirian.

**Kemandirian Ekonomi:** Kemandirian ekonomi adalah tujuan akhir dari pemberdayaan, di mana KPM tidak lagi memerlukan bantuan sosial dan mampu mengelola kehidupan ekonomi mereka secara mandiri. Pendampingan dan motivasi berperan penting dalam mencapai kemandirian ini. Penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan yang efektif dapat membantu KPM PKH keluar dari garis kemiskinan dan menjadi mandiri secara ekonomi. Kemandirian ekonomi juga dicapai melalui peningkatan kapasitas KPM dalam mengelola usaha kecil yang mereka miliki, dengan memberikan akses ke pasar, modal, dan informasi yang relevan. Selain itu, peran serta pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam menyediakan lingkungan yang mendukung sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan kemandirian ekonomi KPM. Dengan menggabungkan konsep pemberdayaan dan kemandirian ekonomi, PKH berupaya untuk tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi KPM untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang.

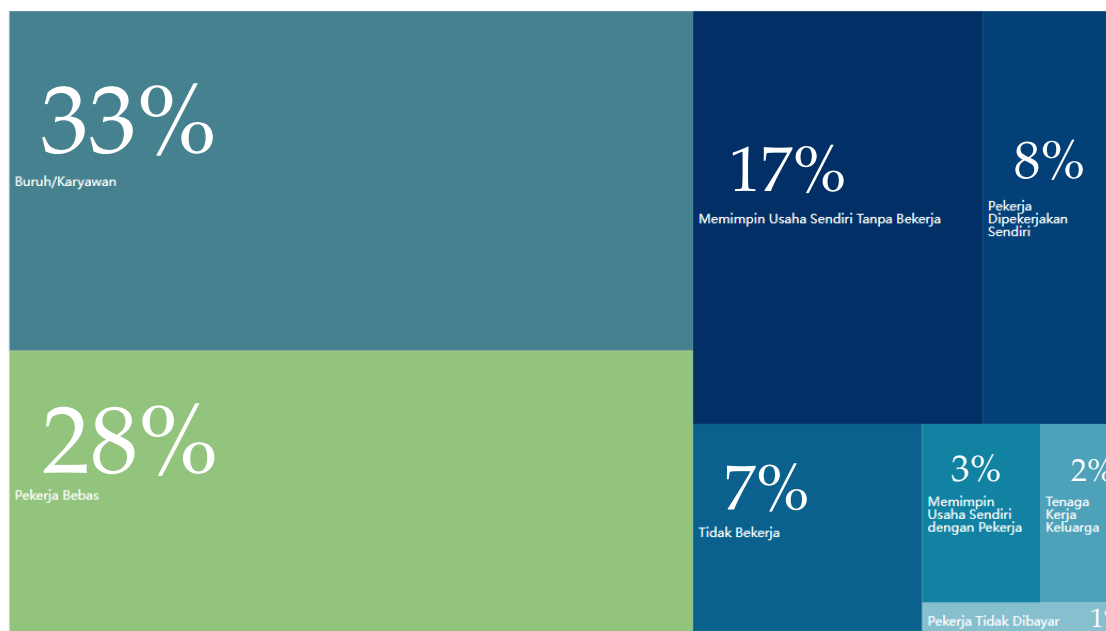
## HASIL KAJIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kombinasi, kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei. Sementara itu, untuk melengkapi data kuantitatif dilakukan wawancara mendalam dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH, para *Stakeholder* yang berpengaruh dalam proses P2K2 dan Graduasi (instansi sosial kabupaten/kota; koordinator PKH kab/kota, pendamping sosial program keluarga harapan).

Survei dilakukan dari tanggal 10–22 Juli 2024, dengan jumlah responden sebanyak 2.561 responden. Data tersebut berasal dari kabupaten/kota sebagai berikut: Kota Tasikmalaya, Kota Tangerang, Kota Surakarta, Kota Malang Kota Cimahi, Kota Bengkulu, Kota Batu, Kota Banjar Baru, Kota Bandung, Kota Tegal, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Malang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Banjar, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Beberapa karakteristik responden peserta diprasyarkan sebagai berikut: (1) KPM dengan usia produktif di bawah 40 tahun, (2) KPM yang memiliki rintisan usaha, (3) periode kepesertaan PKH sudah lebih dari 3 (tiga) tahun, dan (4) KPM yang masih mendapatkan bantuan di tahun 2024.

### A. Pekerjaan Kepala Keluarga

Berikut adalah grafik hasil wawancara dengan responden tentang pekerjaan kepala keluarga:



**Gambar 1.** Pekerjaan Utama Suami



Dari data pada Gambar 1, terlihat kepala keluarga yang memimpin usaha sendiri tanpa pekerja sebanyak 17% dan memimpin usaha sendiri dengan pekerja sebanyak 3 persen. Oleh karena itu, yang layak diberdayakan secara ekonomi sebanyak 20%.

## B. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan kegiatan untuk mengubah perilaku KPM PKH agar menjadi lebih baik. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan, dan berdasarkan survei, 86% KPM PKH rutin mengikuti P2K2, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.

86%

Rutin, Sekali  
Sebulan

10%

Rutin,  
Lebih dari 1x  
per bulan

2%

Rutin,  
Kurang dari  
sebulan sekali

1%

Tidak Rutin

1%

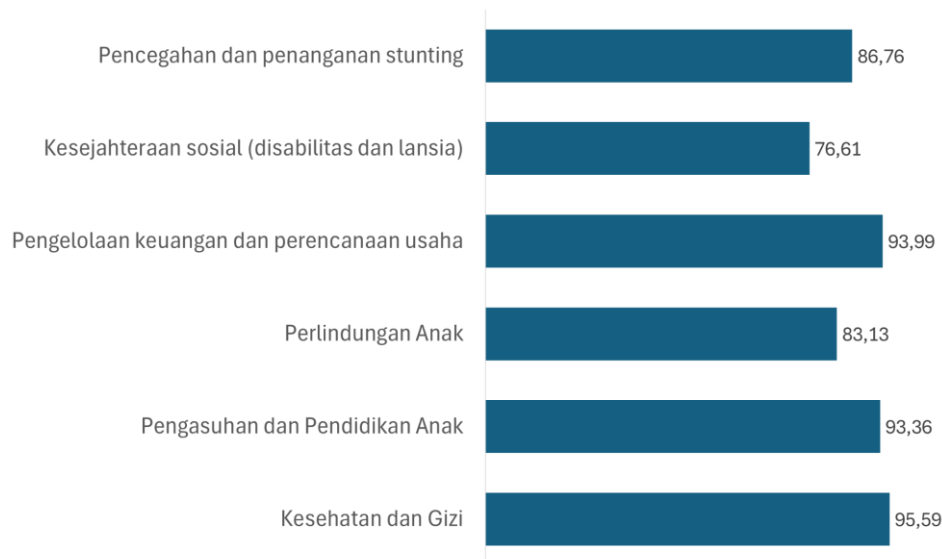
Tidak tahu

**Gambar 2.** Rutinitas Mengikuti Kegiatan P2K2 Setiap Bulan

Secara umum, pelaksanaan P2K2 sudah bagus, dengan melihat data bahwa 86% sudah melaksanakan dengan rutin setiap bulan dan sebanyak 10 % rutin lebih dari satu kali sebulan. Hanya 4% yang tidak melaksanakan secara rutin. Penyebab tidak rutinnya melaksanakan P2K2 antara lain karena wilayah aksesnya yang sulit terjangkau dan beberapa KPM yang belum mengetahui siapa pendampingnya.

## C. KPM Mengikuti Modul P2K2

Pelaksanaan P2K2 Modul Ekonomi (PKPU) masih berdasarkan pada pedoman Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pembelajaran dan pelatihan yang terstruktur. Tujuannya adalah agar KPM dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan lebih baik, meningkatkan keterampilan usaha, dan pada akhirnya mencapai kemandirian ekonomi. Pedoman PKH memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana modul ini harus dijalankan, termasuk metode pengajaran, materi yang harus disampaikan, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk mengukur keberhasilan program. KPM yang mengikuti modul P2K2 beserta modul tambahan (modul tentang *stunting*) dapat terlihat pada Gambar 3.

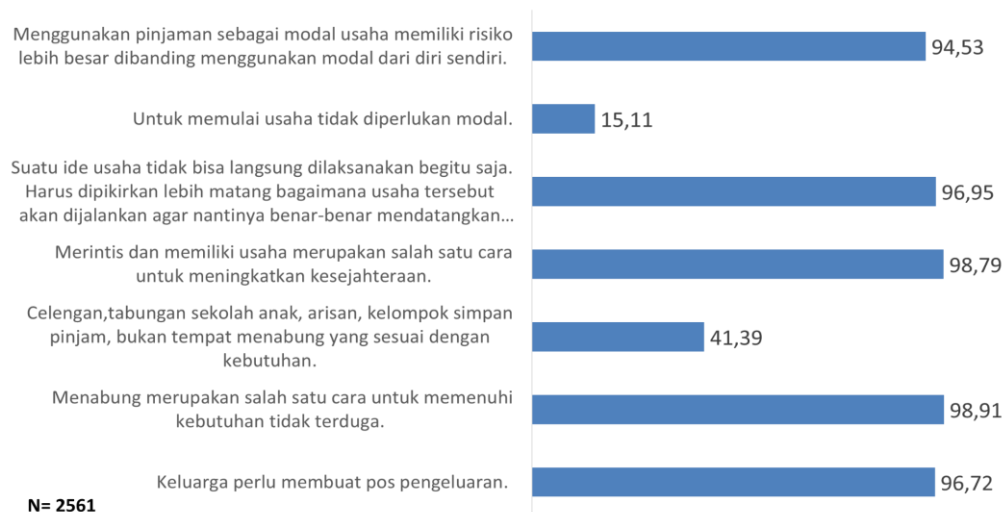


**Gambar 3.** Persentase Mengikuti P2K2 Modul Ekonomi

Data tersebut memperlihatkan bahwa sebanyak 93,99% telah mengikuti P2K2 tentang Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha.

#### **D. Implementasi P2K2 Modul Ekonomi**

Implementasi P2K2 Modul Ekonomi merupakan modal pengetahuan bagi KPM PKH untuk memulai rintisan usaha. Pemahaman KPM PKH terhadap materi modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha dapat pada Gambar 4.

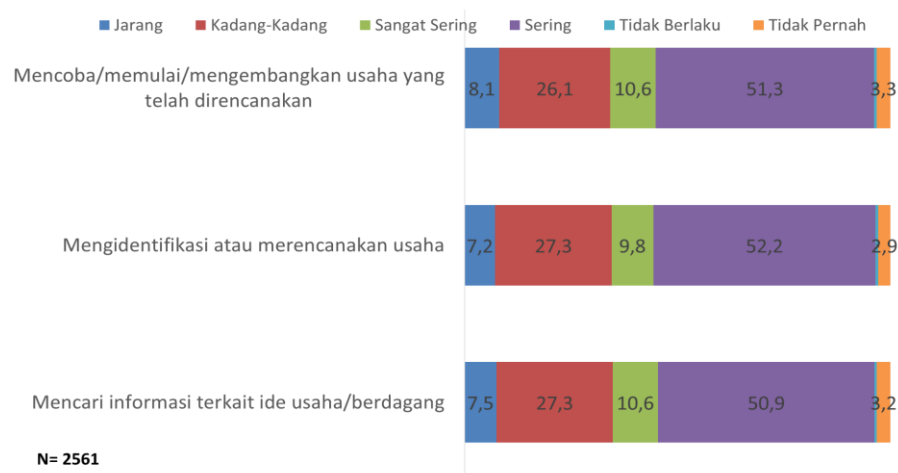


**Gambar 4.** Pemahaman Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha

Gambar 4 menunjukkan bahwa masih banyak persepsi yang berbeda di antara pendamping sehingga diperlukan penguatan kapasitas SDM PKH. Proses belajar mengajar dalam P2K2 Modul Ekonomi dilakukan secara dua arah (timbang balik) dengan

menggunakan media yang tersedia. Di beberapa lokasi, pelaksanaan P2K2 Modul Ekonomi dilakukan dengan menampilkan tayangan melalui *InFocus*, yang sebagian besar tersedia pada Koordinator Pendamping PKH Kecamatan. Untuk pendamping yang tidak memiliki *InFocus*, tayangan video dilakukan dengan memutar di laptop dan kemudian diperlihatkan secara bergantian kepada peserta (KPM PKH) sampai semua peserta melihatnya. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik melalui visualisasi materi, meskipun ada keterbatasan teknis yang harus diatasi.

Beberapa kegiatan P2K2 Modul Ekonomi juga dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari luar PKH sesuai dengan topik pelatihan. Sebagai contoh, pelatihan pemanfaatan lahan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari Petugas Pertanian (PPL Pertanian/Perkebunan). Selain itu, pelatihan untuk mengembangkan usaha rumah tangga melalui pembuatan makanan ringan yang ramah pasar, seperti pembuatan keripik (kacang, pisang, ubi, dll), dilakukan dengan menghadirkan instruktur yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Kehadiran narasumber eksternal ini memberikan nilai tambah dan wawasan praktis yang berharga bagi peserta.



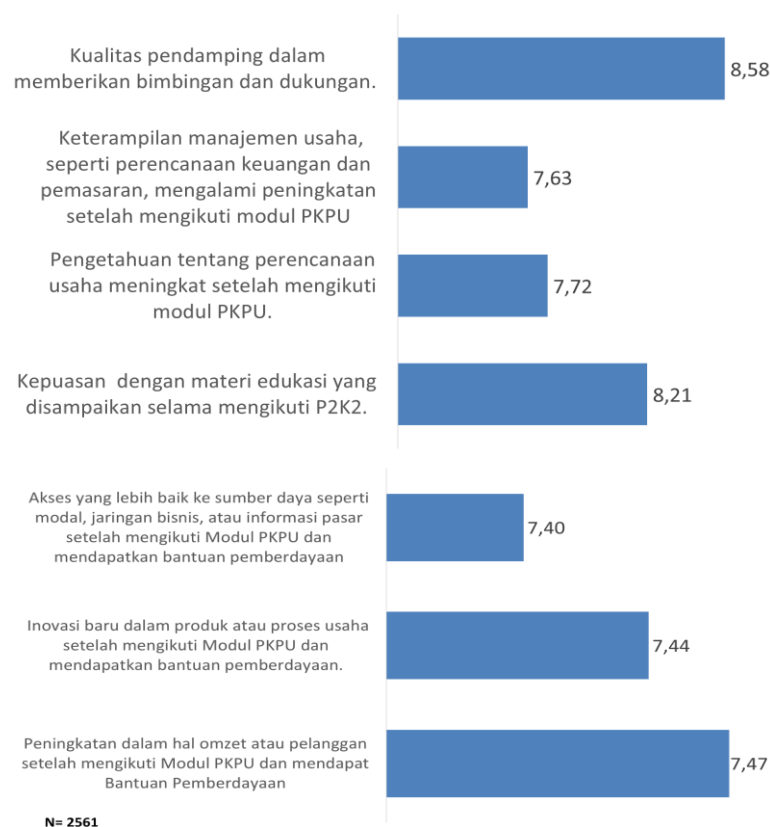
**Gambar 5.** Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha

Kegiatan pelatihan dalam skema P2K2 dilakukan dengan memberikan latihan praktis kepada peserta KPM PKH, tetapi dengan bahan latihan yang sangat terbatas. Bahan biasanya diadakan dengan cara urunan bersama KPM PKH, pendamping, dan bahkan dari instruktur. Meskipun ada keterbatasan dalam penyediaan bahan, pendekatan praktis ini sangat efektif dalam membantu peserta menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan nyata. Latihan praktis ini memungkinkan peserta untuk belajar melalui pengalaman langsung, yang merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif.

Beberapa KPM sudah mulai mempraktikkan hasil latihan yang diikuti. Salah satu contohnya adalah dengan membuat makanan kecil atau camilan seperti gorengan dan keripik yang dijual di sekitar lingkungan KPM. Praktik langsung ini menunjukkan bahwa

pelatihan yang diberikan memiliki dampak nyata dan langsung terhadap kemampuan ekonomi KPM. Dengan memanfaatkan keterampilan baru yang mereka pelajari, KPM dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka dan mulai mengembangkan usaha kecil yang berkelanjutan.

Kajian tentang implementasi P2K2 Modul Ekonomi menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterampilan ekonomi dan kemandirian KPM. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan dalam bahan latihan dan akses terhadap teknologi. Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan dalam P2K2 Modul Ekonomi, termasuk penggunaan narasumber eksternal dan latihan praktis, telah terbukti efektif dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh KPM. Evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian program berdasarkan temuan penelitian akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari program ini. Selain itu, materi dalam modul ekonomi perlu di *update* beberapa tahun sekali sesuai dengan perkembangan di lapangan.



**Gambar 6.** Sesi Perencanaan Usaha

Data pada Gambar 6 menggunakan *range* penilaian antara 1 sampai dengan 10, sehingga data di atas secara umum sudah baik karena di atas 7. Penilaian paling tinggi menurut KPM PKH adalah kualitas pendamping dalam memberikan bimbingan dan dukungan yaitu

sebesar 8,58. Namun demikian pengetahuan pendamping senantiasa harus selalu di-update melalui pelatihan secara rutin.

### E. Pasca P2K2

Temuan yang sangat menarik dalam kajian ini adalah para KPM PKH Peserta P2K2 ketika diminta menjawab apakah kebutuhan (utama) mereka setelah mengikuti P2K2, khususnya pada Modul Ekonomi. Respons bervariasi diberikan oleh para KPM ini, tetapi setidaknya terdapat dalam tiga hal utama, yaitu (1) modal usaha, (2) pengembangan dan keberlanjutan usaha, (3) pendampingan dan pelatihan, dan (4) akses atau kemudahan dalam pemasaran.

Hasil survei tentang kebutuhan utama para Penerima Manfaat (PM) Program Keluarga Harapan (PKH) setelah mengikuti modul P2K2 Modul Ekonomi. Berikut adalah hasil survei tersebut.

- 1) Modal Usaha (59%): mayoritas penerima manfaat menyatakan bahwa yang paling dibutuhkan adalah **modal usaha**. Hal ini menunjukkan kebutuhan yang tinggi akan dana untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.
- 2) Pengembangan dan Keberlanjutan Usaha (29%): sebagian besar lainnya menekankan pentingnya pengembangan dan keberlanjutan usaha mereka.
- 3) Pendampingan dan Pelatihan (7%): beberapa penerima manfaat menganggap pendampingan dan pelatihan sebagai kebutuhan penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
- 4) Kemudahan Pemasaran (5%): sebagian kecil dari penerima manfaat merasa bahwa kemudahan dalam pemasaran produk mereka adalah yang paling dibutuhkan.
- 5) Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa modal usaha adalah kebutuhan utama bagi para penerima manfaat PKH untuk dapat menjalankan atau mengembangkan usaha mereka, diikuti oleh kebutuhan akan pengembangan dan keberlanjutan usaha, pendampingan dan pelatihan, serta kemudahan pemasaran.

59%

Modal Usaha

29%

Pengembangan dan  
Keberlanjutan Usaha

7%

Pendampingan dan  
Pelatihan

5%

Kemudahan  
Pemasaran

**Gambar 7.** Kebutuhan KPM setelah Mengikuti P2K2

# KENDALA DAN TANTANGAN

## A. Skema Graduasi Existing

Graduasi sering dipahami sebagai sesuatu yang “menakutkan” oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bagi mereka, graduasi identik dengan hilangnya “rezeki” yang mereka dapat selama ini dalam bentuk bantuan sosial (Bansos). Bantuan sosial tersebut dianggap sebagai hak mereka sebagai warga miskin. Padahal, tujuan dari bantuan sosial adalah untuk memberikan bantuan sementara sampai mereka mampu berdiri sendiri. Pemahaman yang salah ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih baik tentang tujuan dan manfaat jangka panjang dari graduasi. Sosialisasi ini harus menjelaskan bahwa graduasi adalah langkah menuju kemandirian ekonomi yang lebih berkelanjutan, bukan sekadar akhir dari bantuan yang mereka terima.

Selain itu, dengan adanya graduasi, beberapa fasilitas bagi anggota keluarga juga akan hilang. Fasilitas ini termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), program beasiswa kuliah hingga lulus di Akademi Ilmu Komputer (AKOM) Yogyakarta (untuk KPM di Sleman), dan kesempatan mengikuti program magang selama 2–3 tahun dengan gaji sesuai upah minimum provinsi/kabupaten/kota (UMP/K) di perusahaan-perusahaan di Cikarang/Karawang, Jawa Barat bagi warga tidak mampu yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hilangnya fasilitas-fasilitas ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan KPM tentang masa depan mereka dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya program transisi yang dapat memastikan bahwa keluarga tetap mendapatkan akses ke layanan dasar meskipun mereka sudah lulus dari PKH. Sesungguhnya para KPM tidak keberatan untuk digraduasi dari PKH dengan catatan, bantuan pangan non tunai (BPNT) tidak diputus.

Graduasi bagi KPM yang sudah habis komponen PKH-nya sering berlangsung begitu saja tanpa adanya kegiatan lanjutan yang jelas. Menurut KPM, tidak ada penjelasan atau pengarahan lebih lanjut dari Kementerian Sosial tentang bagaimana mereka harus melanjutkan kehidupan mereka setelah tidak lagi menerima bantuan. Pelaksanaan graduasi mandiri yang diikutkan dalam program pemberdayaan sering terkesan mendadak, dengan persiapan yang tidak cukup untuk membuat KPM mandiri secara ekonomi. KPM merasa dipaksa untuk mandiri tanpa dukungan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa proses graduasi memerlukan perencanaan yang lebih baik dan waktu persiapan yang cukup untuk memastikan keberhasilan program.

KPM menyarankan agar ada persiapan yang cukup bagi mereka yang akan digraduasi mandiri. Persiapan ini meliputi pemberian pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, pembimbingan usaha untuk membantu mereka memulai dan mengelola usaha, serta bantuan permodalan untuk memberikan modal awal. Selain itu, pembukaan akses pasar juga penting untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh KPM memiliki pasar yang dapat diandalkan. Penguatan usaha melalui dukungan teknis dan

*monitoring* pengembangan usaha juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan usaha KPM. Insentif modal lanjutan dapat diberikan untuk memperkuat usaha KPM yang sudah berjalan. Terakhir, graduasi sebaiknya disertai dengan rujukan pendampingan pengembangan usaha kepada dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), untuk memastikan bahwa KPM mendapatkan dukungan yang berkelanjutan.

## **B. Kendala Graduasi**

Pelaksanaan skema graduasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) menghadapi beberapa masalah utama yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Berikut adalah identifikasi masalah utama yang dihadapi.

### **1) Kesulitan Teknis**

Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan pendukung yang disediakan oleh PKH. Ini mencakup keterbatasan dalam infrastruktur teknologi dan kurangnya pelatihan teknis bagi pendamping PKH, sebagai contoh, pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran hasil produksi KPM, atau kemampuan akses Pendamping terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang tersedia pada masing-masing lini *stakeholder* (instansi/dinas) terkait.

### **2) Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran**

KPM memiliki latar belakang dan kondisi sosial-ekonomi yang beragam, yang mempengaruhi respons mereka terhadap program. Keragaman ini menyulitkan pelaksanaan program secara seragam dan menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif.

### **3) Proporsi Kelompok**

Banyaknya jumlah KPM yang belum siap untuk mandiri secara ekonomi yang akhirnya menjadi kendala proses graduasi. Banyak KPM yang masih bergantung pada bantuan sosial tanpa adanya *exit strategy* yang jelas dan terukur.

### **4) Evaluasi dan Monitoring**

Proses *monitoring* dan evaluasi terhadap KPM dan pendamping PKH masih belum optimal. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya akurasi data yang komprehensif untuk menilai kesiapan KPM dalam proses graduasi.

### **C. Tantangan Skema Baru Graduasi**

Tujuan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program Keluarga Harapan, diperlukan skema baru yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan di atas. Skema baru tersebut setidaknya mencakup hal berikut ini.

#### **1) Pengembangan Skema Graduasi yang Lebih Adaptif**

Mengembangkan mekanisme graduasi yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi spesifik KPM, termasuk dukungan lanjutan pasca-graduasi melalui skema program pemberdayaan.

#### **2) Peningkatan Keterampilan dan Pelatihan Teknis bagi Pendamping PKH**

Penting untuk mendesain dan mengimplementasikan skema pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pendamping PKH agar mereka lebih siap dalam mendampingi KPM menuju kemandirian. Skema pelatihan ini khususnya untuk memberikan dan membekali KPM PKH menuju taraf kehidupan sosial ekonomi lebih lanjut.

#### **3) Penyempurnaan Sistem Monitoring dan Evaluasi**

Meningkatkan sistem *monitoring* dan evaluasi dengan menggunakan teknologi terbaru dan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mendapatkan data yang akurat dan *real-time*. Sistem *monitoring* ini sedapat mungkin didesain agar mudah dilakukan (*user friendly*) oleh “Perangkat Program PKH”

#### **4) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal**

Upaya memperkuat kolaborasi dengan pihak eksternal seperti CSR dan NGO untuk memberikan dukungan tambahan dan memastikan keberlanjutan program setelah KPM lulus dari PKH. Dan juga berbagi tugas dan peran dengan instansi/dinas terkait, tentang “siapa melakukan apa” khususnya pada persiapan graduasi KPM PKH. Perlunya pembinaan lebih lanjut setelah Graduasi dengan bekerja sama dengan instansi lain.



Dengan mengimplementasikan skema baru ini, diharapkan Program Keluarga Harapan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia secara berkelanjutan. Dan ini merupakan tantangan bagi penyelenggaraan skema baru Graduasi PKH.

#### **D. SKEMA BARU GRADUASI PKH**

Graduasi KPM PKH merupakan kondisi tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan dan/atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi. Definisi ini juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 56, graduasi terdiri atas (2) jenis, yaitu:

- 1) Graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan, dan
- 2) Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi (mandiri) merupakan berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.

Di luar kedua jenis graduasi di atas, berdasarkan hasil kaji cepat terdapat dua jenis KPM PKH yang memiliki potensi untuk graduasi, yaitu:

- 1) Pengurus KPM meninggal dunia, maka anak KPM yang sudah memenuhi syarat dapat diajukan PENA Muda, dan
- 2) KPM Prospektif yaitu KPM yang sudah mempunyai rintisan usaha dan kepesertaan PKH sudah memasuki tahun ke 5 (lima). KPM Prospektif inilah yang akan menjadi sasaran graduasi yang akan mendapatkan bantuan modal usaha melalui program PENA dan dilanjutkan dengan program pemberdayaan antar lembaga. KPM ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan lepas dari PKH.

##### **a. Komponen Utama Skema Baru**

Komponen utama dari skema baru graduasi PKH mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan keberhasilan program. Pertama, pendalaman materi merupakan komponen krusial di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen keuangan, kewirausahaan, dan strategi peningkatan kesejahteraan. Kedua, bimbingan teknis melibatkan pelatihan intensif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik KPM, termasuk *workshop* dan pelatihan keterampilan yang praktis. Ketiga, evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program dan memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Evaluasi ini mencakup penilaian kemajuan KPM dan penyesuaian strategi jika diperlukan.

##### **b. Mekanisme Pelaksanaan**

Mekanisme pelaksanaan skema baru graduasi PKH melibatkan peran aktif pendamping sosial dan lembaga terkait. Pendamping sosial bertugas untuk memberikan dukungan langsung kepada KPM melalui kunjungan rutin dan konsultasi individu. Mereka juga

bertanggung jawab untuk memantau kemajuan KPM dan memberikan laporan secara berkala. Lembaga terkait seperti Dinas Sosial dan instansi pemerintah lainnya berperan dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan, serta memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat. Kerja sama antara pendamping sosial dan lembaga terkait ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap KPM mendapatkan dukungan yang maksimal.

### **c. Integrasi Program**

Skema baru ini akan diintegrasikan dengan program lain seperti Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Integrasi ini bertujuan untuk memperluas cakupan dan dampak dari skema graduasi PKH. Program PENA, yang telah berhasil dalam pemberdayaan sosial di Surabaya, akan memberikan model dan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh PKH. Selain itu, kemitraan dengan program CSR dari berbagai perusahaan akan menyediakan tambahan sumber daya dan kesempatan bagi KPM untuk mengembangkan usaha kecil mereka. Sinergi antara PKH, PENA, dan CSR diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi KPM. Untuk memperlancar skema baru Graduasi PKH, setidaknya perlu dirumuskan beberapa hal berikut ini;

#### *1) Pembentukan Tim Evaluasi*

Pembentukan tim evaluasi adalah langkah pertama dalam memastikan keberhasilan skema baru graduasi PKH. Tim ini terdiri dari ahli dari berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan metodologi evaluasi, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil. Tim evaluasi juga akan bekerja sama dengan pendamping sosial dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan relevan. Tim evaluasi sebaiknya dibentuk di Tingkat lokal setingkat Desa/Kelurahan dengan pertimbangan pada Tingkat desa ada forum Musyawarah Desa (*Musdes*).

#### *2) Standar Format Evaluasi*

Standar format evaluasi yang digunakan dalam skema baru mencakup indikator keberhasilan yang spesifik dan terukur. Indikator ini meliputi peningkatan pendapatan KPM, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, serta kemampuan KPM untuk mengelola usaha secara mandiri. Format evaluasi ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan KPM dan efektivitas program secara keseluruhan. Selain itu, evaluasi juga mencakup aspek kualitatif seperti kepuasan KPM dan perubahan perilaku yang signifikan.

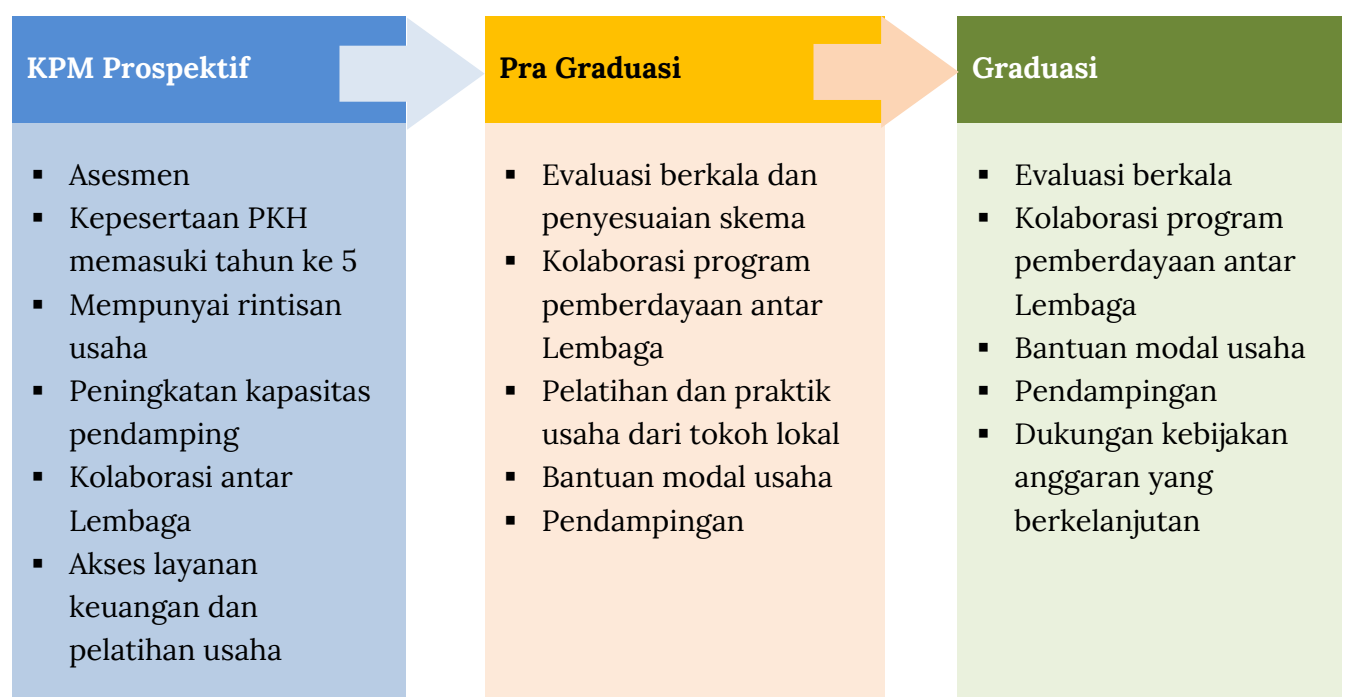
#### *3) Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut*

Hasil evaluasi akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan skema baru. Berdasarkan hasil ini, langkah-

langkah tindak lanjut akan dirumuskan untuk mengatasi masalah yang ditemukan dan memperbaiki strategi yang ada. Tindak lanjut ini bisa berupa penyesuaian modul pelatihan, peningkatan kapasitas pendamping sosial, atau penambahan sumber daya. Tujuan utama dari tindak lanjut ini adalah untuk memastikan bahwa skema graduasi PKH dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi KPM.

#### d. Proses Graduasi

Dari kajian ini diperoleh gambaran terkait proses graduasi yang diharapkan mendekati ideal, di mana proses ini terdiri atas tiga tahapan utama. Ketiga tahapan ini merupakan jalan tengah atas keinginan dan kebutuhan Bersama, antara Penerima Manfaat juga para pemangku kepentingan. Ketiga proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Proses graduasi (peserta PKHG Existing)

Ke depan, diharapkan sudah mulai dipertimbangkan untuk menerapkan skema graduasi dengan menerapkan standar dan prosedur Rencana Graduasi dari awal pelaksanaan Program. Berdasarkan data dan beberapa referensi pelaksanaan graduasi, dapat dirumuskan indikator graduasi yang dapat dilaksanakan selama 5 tahun (lihat Tabel 1).

**Tabel 1. Skema Graduasi Peserta PKH Baru**

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
<b>Asesmen KPM Prospektif</b>	<b>Merintis dan Pengembangan usaha</b>	<b>Akses Modal dan Pasar</b>	<b>Penguatan Kapasitas</b>	<b>Transisi dan Graduasi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data KPM prospektif (yang sudah punya rintisan usaha dan berpotensi memulai usaha)</li> <li>• <i>Baseline</i> kondisi ekonomi keluarga (Pendapatan, pengeluaran, konsumsi)</li> <li>• Pengetahuan terkait P2K2 modul ekonomi yang melibatkan <i>stakeholder</i> terkait</li> <li>• Pemantauan dan Evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan usaha</li> <li>• Merintis usaha</li> <li>• Mengembangkan usaha</li> <li>• Pelatihan usaha (teknis)</li> <li>• Pemantauan dan Evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses modal usaha ke lembaga keuangan baik formal maupun non formal</li> <li>• Akses pasar</li> <li>• Pemantauan dan Evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Coaching</i> (<i>mentoring</i>, konsultasi usaha)</li> <li>• Pengembangan jaringan usaha</li> <li>• Pemantauan dan Evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga</li> <li>• Jumlah data KPM yang Graduasi</li> <li>• Rujukan ke program lain</li> </ul>

# PENUTUP

## KESIMPULAN

Kajian ini mengungkapkan beberapa temuan utama yaitu bahwa;

- 1) **Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) telah mendapatkan fasilitasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).** Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga khususnya pada Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha sebagai modal pengetahuan dan keterampilan KPM PKH untuk mandiri. Namun demikian, **Modul P2K2 perlu disesuaikan dengan karakteristik sumber daya lokal dan tidak bisa digeneralisasi jenis usahanya.**
- 2) Bagi KPM PKH yang telah mempunyai rintisan usaha dan sudah mengikuti P2K2 Prospektif untuk dilakukan graduasi dengan sebelumnya mendapatkan **penguatan ekonomi terlebih dahulu juga melalui serangkaian pelatihan usaha.**
- 3) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan skema graduasi yang diusulkan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun PKH telah berhasil mengurangi kemiskinan di antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM), **masih ada tantangan signifikan dalam mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.** Beberapa masalah yang teridentifikasi termasuk kesulitan teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, dan kurangnya evaluasi yang efektif.

Skema baru yang diusulkan mencakup pendalaman materi, bimbingan teknis, dan evaluasi berkala. Skema ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan KPM dalam mencapai kemandirian ekonomi dengan dukungan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Melalui integrasi dengan program lain seperti PENA dan inisiatif CSR, skema ini diharapkan dapat memberikan dukungan berkelanjutan dan memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi bagi KPM.

## REKOMENDASI

### 1) Pengembangan Kapasitas Pendamping Sosial

Kementerian Sosial perlu memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada pendamping sosial untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada KPM terutama pada materi modul ekonomi (motivasi KPM untuk graduasi dan memulai usaha). Pendampingan berkelanjutan bagi KPM pasca graduasi tetap diperlukan untuk memantau perkembangan usaha dan kondisi KPM. Juga penekanan kepada Tujuan Perlindungan Sosial Adaptif khususnya penghidupan yang berkelanjutan.

### 2) Peningkatan Akses terhadap Layanan Keuangan dan Pelatihan Usaha

Memfasilitasi akses KPM ke layanan keuangan dan pelatihan usaha untuk mendukung mereka dalam mencapai kemandirian ekonomi. Penguatan ekonomi dan akses keuangan KPM kepada Lembaga-lembaga keuangan lokal (Badan Kredit Kecamatan, BUMDES – Dana Desa dan lain-lain).

### 3) Kolaborasi dan Sinergi Antar Lembaga

Meningkatkan koordinasi antara dinas sosial, pemerintah daerah setempat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung implementasi skema baru. Ini termasuk integrasi dengan program PENA dan inisiatif CSR serta berbagai program pemberdayaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dapat menyediakan sumber daya tambahan. Di Tingkat Pusat (Kementerian/Lembaga) banyak Kementerian/Lembaga dengan program pemberdayaan ataupun pelatihan yang juga bisa diberikan kepada KPM PKH.

### 4) Evaluasi Berkala dan Penyesuaian Skema

Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan skema baru untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan menyesuaikan strategi sesuai dengan temuan evaluasi.

### 5) Dukungan Kebijakan yang Berkelanjutan

Memastikan bahwa kebijakan yang mendukung skema baru ini bersifat berkelanjutan dan didukung oleh regulasi yang jelas serta alokasi anggaran yang memadai

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110. <https://doi.org/10.1257/pol.20190245>
- Habibullah, H. (2011). Peran pendamping pada program keluarga harapan di Kabupaten Karawang. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 16(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v16i2.956>
- Habibullah, H., Yuda, T. K., Setiawan, H. H., & Susantyo, B. (2023). Moving beyond stereotype: A qualitative study of long-standing recipients of the Indonesian conditional cash transfers ( CCT /PKH ). *Social Policy & Administration*. <https://doi.org/10.1111/spol.12946>
- Habibullah, & Noviana, I. (2013). *Kebijakan Pendamping program keluarga harapan*. P3KS Press.
- Hasmin, H. (2011). Kemiskinan dan Solusi pengentasan kemiskinan perkotaan di Indonesia. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 8(4 SE-Articles). <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/560>
- Inayah, R. (2023). Strategi komunikasi penyuluhan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(2), 134–149.
- Irmayani, N. R., Susantyo, B., Mujiyadi, B., Suradi, S., Erwinsyah, R. G., Sugiyanto, S., Habibullah, H., Nainggolan, T., As' adhanayadi, B., & Soetjipto, W. (2019). *Kinerja Pendamping program keluarga harapan pasca diklat pertemuan peningkatan kemampuan keluarga*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Kementerian Sosial RI. (2018). Modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kementerian Sosial RI. <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20181010110008.pdf>
- Nando Caesar, U., Toni, H., & Yumiarti, Y. (2021). *Strategi komunikasi dalam sosialisasi program keluarga harapan (Studi kasus Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong)*. IAIN Curup.
- Reza, M. H. (2023). *Strategi komunikasi Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH)*. IAIN Ponorogo.
- Rubin, A., & Babby, E. (2007). *Research methods for social work*. Brooks/Cole Cengage Learning.
- Setiawan, H. H., Yuda, T. K., Susantyo, B., Sulubere, M. B., Ganti, M., Habibullah, H., Sabarisman, M., & Murni, R. (2023). Scaling up social entrepreneurship to reduce poverty: Exploring the challenges and opportunities through stakeholder engagement. *Frontiers in Sociology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1131762>
- Suryati, L. (2023). *Faktor-faktor pendorong dan penghambat graduasi sejahtera mandiri penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Tengah*. Universitas Lampung.
- Wijaya, S. (2019). Gerakan literasi dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Masyarakat pra sejahtera. *Sastra Wijaya*, 4(2), 131–145.
- Yuda, T. K., Setiawan, H. H., Habibullah, Susantyo, B., & Suyatna, H. (2023). Institutionalized Social entrepreneurship in Indonesia: A report on the challenges of state-driven social entrepreneurship promotion within the Five Cities' social assistance program. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 00(00), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23276665.2023.2270087>

**P**rogram Keluarga Harapan (PKH), diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada 2007, adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun telah menunjukkan hasil positif, PKH menghadapi tantangan dalam proses graduasi penerima manfaat. Banyak keluarga kesulitan mencapai kemandirian ekonomi berkelanjutan tanpa dukungan lanjutan. Upaya seperti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) belum sepenuhnya efektif dalam mendorong graduasi mandiri. Diperlukan skema baru yang lebih komprehensif dan dapat diterima berbagai pihak untuk mendukung transisi keluarga penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi, sambil tetap mempertahankan perlindungan sosial yang diperlukan.

BRIN Publishing  
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:  
**Penerbit BRIN**, anggota Ikapi  
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,  
Jln. M.H. Thamrin No. 8,  
Kota Jakarta Pusat 10340  
*E-mail:* penerbit@brin.go.id  
*Website:* penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.1502

